



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

LAPORAN JENIS PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL

SEMESTER II TAHUN 2025

INSPEKTORAT BMKG

Jl. Angkasa I No. 02, Kemayoran, Jakarta 10610
Telp. (021) 424 6321 Fax. (021) 424 6703 P.O Box 3540 Jkt
Website: <http://www.bmkg.go.id>

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) Inspektorat BMKG Semester II Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan ILHP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai pelaksanaan pengawasan intern yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan BMKG.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Jakarta, Januari 2026

Inspektur BMKG



Nasrul Wathon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	4
BAB I. INFORMASI UMUM	5
A. Dasar Hukum	5
B. Struktur Organisasi.....	5
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	5
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	5
BAB II. INFORMASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL BMKG.....	6
A. Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP	6
B. Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP	6
C. Status Tindak Lanjut Temuan.....	7
BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	7
A. Simpulan	7
B. Hambatan.....	8
C. Rekomendasi.....	8
LAMPIRAN	9

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Pada Semester II Tahun 2025, Inspektorat BMKG telah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa **Audit Operasional dan Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)** di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan **209 temuan** dengan distribusi terbesar pada aspek **ketidakpatuhan terhadap peraturan**.

Dari 209 temuan tersebut, APIP BMKG mengeluarkan **265 rekomendasi perbaikan**, dengan tiga kategori rekomendasi terbanyak yaitu:

1. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan (27,5%).
2. Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat (23,8%).
3. Rekomendasi lain-lain (48,7%).

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan masih menemukan kelemahan signifikan pada aspek kepatuhan regulasi, pengendalian intern, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang lebih konsisten dan sistematis agar temuan tidak berulang pada periode berikutnya.

BAB I. INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
4. Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BMKG Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Inspektorat BMKG dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Sub Bagian Tata Usaha, dengan fungsi utama melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

1. Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai hasil pengawasan Inspektorat BMKG.
2. Menyajikan informasi perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Menjadi dasar rekomendasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

1. Program Pengawasan Semester II 2025 untuk kegiatan Audit adalah 59 UPT.
2. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 61 UPT (103%).

BAB II. INFORMASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL BMKG

A. Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP

Berikut disajikan hasil temuan Audit Operasional & Audit PBJ yang dilaksanakan pada periode Januari 2025 hingga Desember 2025 pada unit pelaksana teknis (UPT) BMKG yang tersebar di wilayah Indonesia:

NO.	SUB KELOMPOK TEMUAN	JUMLAH KEJADIAN	%
		SEMESTER II 2025	
1.	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	132	49,81
2.	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	87	32,83
3.	Temuan 3E	46	17,36
Jumlah		265	100

Sumber: Inspektorat BMKG

Hasil dari kegiatan Audit Operasional & Audit PBJ diketahui temuan yang paling dominan terjadi pada Tahun 2025 adalah pada sub kelompok Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan dengan jumlah kejadian sebanyak 132 temuan atau 49,81%, disusul temuan pada sub kelompok Kelemahan Sistem Pengendalian Internal sebanyak 87 temuan atau 32,83%, dan terakhir adalah pada sub kelompok Temuan Tidak Hemat, Tidak Ekonomis dan Tidak Efektif (3E) sebanyak 46 temuan atau 17,36% dari keseluruhan temuan sebanyak 265 rekomendasi.

B. Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional & Audit PBJ APIP

Dari hasil temuan audit operasional yang telah dilaksanakan APIP pada periode Semester II Tahun 2025 tersebut, diberikan rekomendasi yang diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk perbaikan kinerja UPT yang dinilai kurang. Adapun rekomendasi tersebut diantaranya:

1. Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat
2. Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
3. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
4. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
5. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian

7. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
8. Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan rekomendasi kepada instansi yang berwenang
9. Penghapusan barang milik negara/daerah
10. Pelaksanaan sosialisasi
11. Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
12. Lain-lain

Dari total 209 temuan hingga periode Semester II Tahun 2025 telah diberikan sebanyak 265 rekomendasi perbaikan. Pada tiap jenis temuan, bisa diberi beberapa rekomendasi sekaligus. Berikut disajikan jumlah rekomendasi yang diberikan berdasarkan jenis temuannya:

NO.	SUB KELOMPOK TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI
		SEMESTER II 2025
1.	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	132
2.	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	87
3.	Temuan 3E	46
Jumlah		265

Sumber: Inspektorat BMKG

Dari **265** rekomendasi pada Semester II Tahun 2025 di atas, **tiga jenis rekomendasi paling dominan** yang diberikan oleh APIP adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sebanyak **73** rekomendasi (**27,5%**), disusul rekomendasi penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat sebanyak **63** rekomendasi (**23,8%**), dan rekomendasi lain-lain sebanyak **129** rekomendasi (**48,7%**).

C. Status Tindak Lanjut Temuan

Dari **265 Rekomendasi** pada Semester II Tahun 2025 di atas, diketahui bahwa **224** rekomendasi belum ditindaklanjuti dan **2** rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan **37** rekomendasi sudah tuntas.

BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Pada Semester II Tahun 2025, Inspektorat BMKG melalui kegiatan Audit Operasional dan Audit PBJ mendapatkan 209 temuan, dengan proporsi terbesar berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan (49,81%).
2. Temuan berikutnya adalah kelemahan sistem pengendalian intern (32,83%) dan temuan 3E (tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif) sebanyak 17,36%.
3. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, telah diberikan 265 rekomendasi, dimana rekomendasi terbanyak berupa perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan (27,5%), serta rekomendasi penyetoran ke kas negara/daerah (23,8%) dan lain-lain.
4. Pola temuan menunjukkan bahwa aspek kepatuhan regulasi dan penguatan sistem pengendalian intern masih menjadi isu utama yang perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi temuan berulang.

B. Hambatan

1. **Kepatuhan unit kerja masih rendah** dalam mengikuti peraturan dan standar biaya, terbukti dengan dominasi temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Temuan berikutnya adalah kelemahan sistem pengendalian intern (32,83%) dan temuan 3E (tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif) sebanyak 17,36%.
2. **Sistem Pengendalian Intern (SPI)** pada sebagian UPT belum berjalan efektif, khususnya dalam pencatatan, pelaporan, dan pengendalian biaya.

C. Rekomendasi

1. Penguatan kepatuhan regulasi melalui sosialisasi dan penegakan aturan, khususnya terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, dan prosedur PBJ.
2. Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap UPT, termasuk monitoring dan supervisi rutin oleh pimpinan unit kerja.

LAMPIRAN

Rekap Jenis Pelanggaran dalam Pengawasan Internal BMKG Semester II Tahun 2025

DASHBOARD INFORMASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL BMKG

Jenis Pelanggaran dalam PI BMKG

Tahun: 2025

Semester 2

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

132

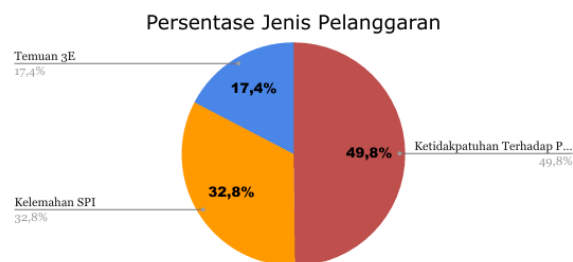
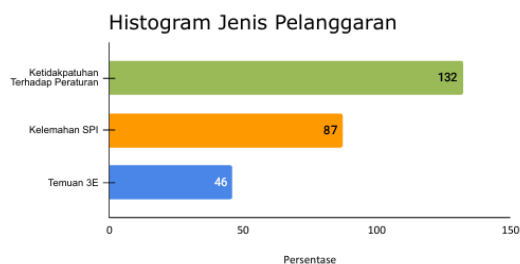
Kelemahan SPI

87

Temuan 3E

46

Histogram dan Persentase Berdasarkan Jenis Pelanggaran



Rekomendasi/ Tindak Lanjut Atas Pelanggaran

- 1 Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat
- 2 Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
- 3 Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
- 4 Lain-lain
- 5 Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
- 6 Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
- 7 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
- 8 Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
- 9 Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
- 10 Penghapusan barang milik negara/daerah
- 11 Pelaksanaan sosialisasi
- 12 Perubahan atau perbaikan struktur organisasi

Status Tindak Lanjut Atas Pelanggaran

Belum Tuntas

224

Proses

2

Tuntas

37